

## REKONSTRUKSI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI NASIONAL

Muhammad Zainudin<sup>1</sup>, Muhammad Sohیب<sup>2</sup>, Maftuh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia

Email : masterzain8899@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadsohib797@gmail.com<sup>2</sup>, maftuh@unkafa.ac.id<sup>3</sup>

Received: January 2026

Accepted: February 2026

Published: April 2026

### Abstract :

*Religious moderation is a strategic national agenda aimed at strengthening civic character and preventing radicalism within educational settings. The integration of moderate values into the Islamic Education (PAI) curriculum is expected to cultivate inclusive and tolerant attitudes among students. However, its implementation continues to encounter conceptual and pedagogical challenges that reduce the effectiveness of value internalization. This study aims to analyze the effectiveness of religious moderation implementation in the PAI curriculum and to propose a more contextual and applicable curriculum reconstruction model. This research employs a qualitative approach based on library research, analyzing national policy documents and reviewing empirical studies published within the last five years. No primary field data were collected. Data were examined using content analysis and thematic synthesis to identify implementation patterns, challenges, and opportunities for curriculum improvement. The findings reveal that the implementation of religious moderation in the PAI curriculum remains largely normative and top-down, lacking clear operational pedagogical guidelines and insufficiently supported by teacher capacity development in managing diversity-oriented learning. In addition, school ecosystems that are not yet fully inclusive and limited student digital literacy further hinder the authentic internalization of moderate values. The study concludes that curriculum reconstruction is necessary through strengthening socio-religious competencies, applying dialogical pedagogy, integrating digital literacy, and adopting a whole-school approach to ensure effective and sustainable implementation of religious moderation in the national education system.*

**Keywords :** *Religious Moderation; Islamic Education Curriculum; Policy Implementation; Moderate Values; Curriculum Reconstruction.*

### Abstrak :

Moderasi beragama merupakan agenda strategis pemerintah dalam memperkuat karakter kebangsaan dan mencegah radikalisme di lingkungan pendidikan. Integrasi nilai-nilai moderat dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) diharapkan membentuk sikap keberagaman yang inklusif dan toleran pada peserta didik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala konseptual dan pedagogis yang berdampak pada rendahnya efektivitas internalisasi nilai moderat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi moderasi beragama dalam kurikulum PAI serta merumuskan model rekonstruksi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan analisis dokumen kebijakan nasional dan telaah literatur empiris lima tahun terakhir. Tidak terdapat pengumpulan data lapangan primer. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan, tantangan implementasi, serta kebutuhan penguatan kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam kurikulum PAI masih bersifat normatif dan top-down, belum disertai panduan pedagogis operasional, serta belum diimbangi peningkatan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran keberagaman. Selain itu, ekosistem sekolah yang belum sepenuhnya inklusif dan

keterbatasan literasi digital peserta didik turut menghambat pembentukan sikap moderat secara autentik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi kurikulum melalui penguatan kompetensi sosial-keagamaan, penerapan pedagogi dialogis, integrasi literasi digital, dan pendekatan whole school approach guna mewujudkan implementasi moderasi beragama yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama; Kurikulum Pendidikan Islam; Implementasi Kebijakan; Nilai Moderat; Rekonstruksi Kurikulum.

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat harmoni sosial serta mencegah berkembangnya ideologi ekstrem di lingkungan pendidikan. Peningkatan kasus intoleransi di ruang publik, dinamika politik identitas, dan maraknya persebaran wacana keagamaan eksklusif di media digital menjadi faktor pendorong utama lahirnya kebijakan penguatan moderasi beragama pada seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah (Kementerian Agama RI, 2021; Kemenag, 2020). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun sikap keberagaman yang inklusif dan dialogis (Azra, 2021; Baidhawiy, 2020). Pemerintah melalui Roadmap Moderasi Beragama 2020–2024 menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar sentral dalam internalisasi nilai moderat dan pembentukan karakter keberagaman generasi muda (Kemenag, 2020; Junaidi, 2021).

Dalam konteks kurikulum, nilai-nilai moderasi beragama telah diintegrasikan ke dalam Capaian Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kurikulum Merdeka, khususnya terkait sikap toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap keragaman agama maupun budaya. Namun, integrasi ini masih bersifat deklaratif dan normatif, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pedagogis yang kompleks di ruang kelas (Rahmawati & Yusuf, 2022; Suryana, 2022). Guru PAI dituntut untuk tidak hanya memahami konsep moderasi beragama, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogis untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran dialogis, kolaboratif, dan berbasis pengalaman siswa (Hasanah, 2023).

Sejumlah penelitian lima tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan kurikulum dan implementasinya di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Hasanah (2023) menemukan bahwa sebagian besar guru PAI memahami moderasi beragama hanya sebagai konsep nilai moral, bukan sebagai kompetensi sosial yang harus dibentuk melalui aktivitas pembelajaran yang terukur. Kondisi ini menyebabkan internalisasi nilai

moderat lebih sering berhenti pada tataran pengetahuan (cognitive level) tanpa menyentuh ranah sikap dan tindakan (affective-behavioral level) peserta didik (Fauzi & Ma'arif, 2021; Arifin, 2020).

Selain itu, implementasi moderasi dalam PAI masih menghadapi persoalan kapasitas guru, minimnya pelatihan pedagogi moderasi, dan kurangnya dukungan sumber belajar yang relevan (Fauzi & Ma'arif, 2021; Mulyadi, 2022). Guru kerap mengadopsi pendekatan ceramah yang menekankan narasi normatif daripada pendekatan dialogis yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami pengalaman keberagaman secara kritis. Akibatnya, pembelajaran moderasi kurang menyentuh aspek pembentukan disposition, seperti empati, kerja sama lintas kelompok, dan keterampilan resolusi konflik (Suryana, 2022).

Faktor lain yang turut menentukan efektivitas implementasi moderasi adalah ekosistem sekolah. Lingkungan sosial sekolah, kultur organisasi, dan kebijakan ekstrakurikuler berpengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai moderat. Penelitian oleh Nugraha dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan kultur inklusif dan kegiatan kolaboratif lintas budaya terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan sikap toleransi dibandingkan sekolah yang masih menerapkan segregasi sosial-ekstrakurikuler. Temuan ini sejalan dengan studi Lestari (2021) yang menekankan pentingnya budaya sekolah sebagai ruang praksis moderasi beragama.

Di sisi lain, era digital menciptakan tantangan baru bagi penguatan moderasi beragama. Peserta didik saat ini terpapar beragam informasi keagamaan melalui media sosial, termasuk konten radikal atau konservatif-eksklusif yang dapat memengaruhi cara pandang mereka (Ilham & Setiawan, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi moderasi beragama dalam kurikulum tidak hanya menuntut penguatan konsep, tetapi juga integrasi literasi digital keagamaan sebagai bagian dari kompetensi abad 21 (Hidayat, 2022; Prasetyo, 2023).

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis efektivitas implementasi moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Islam serta merumuskan model rekonstruksi kurikulum yang lebih kontekstual, pedagogis, dan berorientasi kompetensi. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis dokumen kebijakan, telaah literatur empiris 2020–2024, serta sintesis temuan penelitian implementatif pada berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan kurikulum PAI yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan kritis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana moderasi beragama diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Islam serta menilai efektivitas implementasinya dalam sistem pendidikan nasional. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks, makna kebijakan, dan implikasi pedagogis dari penguatan moderasi beragama.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi kebijakan pendidikan, seperti *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta dokumen Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Kurikulum Merdeka. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema moderasi beragama dan kurikulum Pendidikan Islam, khususnya yang terbit dalam lima tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan indikator moderasi beragama dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan. Sementara itu, kajian literatur dilakukan untuk menelaah temuan-temuan empiris mengenai pelaksanaan dan tantangan moderasi beragama di sekolah dan madrasah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis isi untuk mengkaji muatan moderasi beragama dalam dokumen kurikulum dan kebijakan. Kedua, analisis kebijakan kritis untuk menelaah kesesuaian antara kebijakan normatif dan praktik implementasi di lapangan. Ketiga, analisis tematik untuk mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama, seperti pendekatan pembelajaran, kompetensi guru, dan dukungan ekosistem sekolah.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen kebijakan dan hasil penelitian yang relevan. Selain itu, proses analisis dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi untuk mengurangi bias penafsiran. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, sehingga hasil kajian lebih

menekankan pada analisis kebijakan dan konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesenjangan Etika Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka dirancang sebagai upaya transformasi pendidikan nasional dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas kurikulum, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Salah satu dimensi penting dalam profil tersebut adalah pengembangan nilai moral, etika, dan sikap sosial yang inklusif. Dalam konteks ini, moderasi beragama seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan etika, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan pembelajaran lintas disiplin (Kemdikbudristek, 2022).

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Kurikulum Merdeka dengan praktik pendidikan etika dan moderasi beragama di sekolah. Moderasi beragama sering diposisikan sebagai wacana kebijakan dan slogan pendidikan karakter, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasikan sebagai kerangka etis yang membimbing proses pembelajaran dan relasi sosial di lingkungan sekolah (Sutrisno, 2022).

### **Pendidikan Etika yang Terfragmentasi dan Dampaknya terhadap Moderasi Beragama**

Pendidikan etika dalam Kurikulum Merdeka masih cenderung terfragmentasi ke dalam proyek atau tema tertentu, seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sementara itu, moderasi beragama menuntut pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran. Ketika pendidikan etika tidak dirancang secara sistemik, moderasi beragama berisiko dipahami secara parsial sekadar sebagai sikap toleran normatif, bukan sebagai kesadaran etis yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan gap antara pengetahuan keagamaan dan praksis sosial. Peserta didik dapat memahami konsep moderasi beragama secara kognitif, tetapi tidak selalu mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang melibatkan perbedaan pandangan, keyakinan, dan identitas (Azra, 2021).

### **Orientasi Kognitif Kurikulum dan Lemahnya Internalitas Nilai Moderasi**

Salah satu problem utama pendidikan etika di Indonesia adalah dominannya orientasi kognitif dalam pembelajaran dan evaluasi. Sistem penilaian masih lebih menekankan capaian akademik yang terukur, sementara aspek afektif dan perilaku yang menjadi inti moderasi beragama belum memiliki

instrumen evaluasi yang mapan. Akibatnya, moderasi beragama sering diperlakukan sebagai materi tambahan dalam Pendidikan Agama Islam, bukan sebagai kompetensi sosial-etik yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa strategi pedagogis reflektif dan dialogis, pendidikan moderasi beragama sulit menghasilkan perubahan sikap yang signifikan. Nilai moderasi cenderung berhenti pada level wacana, tidak terinternalisasi sebagai kebiasaan berpikir dan bertindak peserta didik (Rohman & Lessy, 2020; Sutrisno, 2022).

Tantangan Etika dan Moderasi Beragama di Era Digital, kesenjangan etika pendidikan semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas digital. Peserta didik saat ini banyak mengakses wacana keagamaan melalui media sosial yang tidak selalu mempromosikan nilai moderasi. Narasi keagamaan yang eksklusif, simplistik, dan bahkan ekstrem seringkali lebih dominan dibandingkan wacana keagamaan moderat. Dalam konteks ini, lemahnya pendidikan etika digital berdampak langsung pada efektivitas moderasi beragama di sekolah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya berperan sebagai ruang klarifikasi etis terhadap informasi keagamaan digital. Kurikulum Merdeka belum secara eksplisit mengintegrasikan literasi digital keagamaan sebagai bagian dari pendidikan etika dan moderasi beragama, sehingga peserta didik rentan terhadap bias dan polarisasi keagamaan di ruang digital (Nisa et al., 2021).

Keteladanan dan Budaya Sekolah sebagai Faktor Penentu, moderasi beragama tidak hanya bergantung pada kurikulum tertulis, tetapi juga pada budaya sekolah dan keteladanan pendidik. Ketika pendidikan etika tidak terwujud dalam relasi sosial di sekolah misalnya melalui praktik diskriminatif, komunikasi otoriter, atau minimnya ruang dialog pesan moderasi beragama kehilangan kredibilitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan etika pendidikan bukan semata persoalan kurikulum, melainkan persoalan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Guru memiliki posisi strategis sebagai aktor etis dan kultural dalam pembentukan moderasi beragama. Namun, tanpa penguatan kompetensi pedagogis dan pemahaman moderasi beragama yang komprehensif, peran guru dalam Kurikulum Merdeka belum optimal (Zuhdi, 2023).

Implikasi terhadap Rekonstruksi Moderasi Beragama, Kesenjangan etika pendidikan dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak cukup diintegrasikan sebagai konten kurikulum semata.

Diperlukan rekonstruksi yang menempatkan moderasi beragama sebagai kerangka etis pedagogis, yang menjiwai tujuan pembelajaran, metode, relasi guru-siswa, serta sistem evaluasi. Tanpa rekonstruksi tersebut, moderasi beragama berisiko menjadi agenda simbolik yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik.

### **Paradoks Pendidikan Karakter di Tengah Krisis Keteladanan dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama**

Pendidikan karakter sejak lama ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia. Nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan saling menghormati secara eksplisit tercantum dalam tujuan pendidikan nasional maupun dalam berbagai kebijakan kurikulum. Namun demikian, implementasi pendidikan karakter di sekolah menghadapi paradoks serius ketika berlangsung di tengah krisis keteladanan dari figur-figur otoritatif, baik di ruang pendidikan, ruang publik, maupun ruang digital. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas internalisasi nilai moderasi beragama (Suyadi & Sutrisno, 2022; Muslich, 2018).

Secara teoritik, pendidikan karakter menuntut konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang diteladankan. Lickona (2018) menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak cukup berhenti pada pengetahuan moral (*moral knowing*), tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata (*moral action*). Ketika peserta didik menyaksikan ketidaksesuaian antara ajaran dan praktik misalnya sikap intoleran, ujaran kebencian, atau politisasi agama oleh elite sosial dan keagamaan maka nilai moderasi beragama yang diajarkan di sekolah kehilangan otoritas moralnya (Lickona, 2018; Berkowitz & Bier, 2014).

Paradoks ini semakin kompleks dalam konteks moderasi beragama. Moderasi beragama menuntut sikap adil, seimbang, anti-kekerasan, dan menghargai keberagaman. Namun, di ruang publik Indonesia, peserta didik kerap dihadapkan pada figur keagamaan yang justru mempertontonkan sikap eksklusif, konfrontatif, bahkan provokatif. Menurut Baidhawiy (2020), kegagalan elite agama dan pendidik dalam menampilkan wajah Islam yang ramah dan inklusif berpotensi melahirkan disonansi kognitif pada generasi muda, yakni kebingungan antara nilai moderasi yang diajarkan dan realitas sosial yang mereka saksikan. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Huda (2021) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi moderasi dalam kurikulum dan praktik sosial keagamaan di ruang publik.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keteladanan (*uswah*) merupakan

metode utama pembentukan karakter. Al-Attas (2019) menegaskan bahwa krisis pendidikan bukan semata krisis kurikulum, melainkan krisis adab yang berakar pada hilangnya figur teladan yang berintegritas. Ketika guru, tokoh agama, dan pemimpin sosial gagal menampilkan adab moderat dalam beragama, maka pendidikan karakter dan moderasi beragama berisiko tereduksi menjadi slogan normatif tanpa daya transformasi (Azra, 2021).

Krisis keteladanan juga diperparah oleh ekosistem digital. Media sosial memungkinkan peserta didik mengakses berbagai narasi keagamaan tanpa filter pedagogis. Studi Zarkasyi dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa inkonsistensi sikap tokoh publik di media digital memperlemah kepercayaan peserta didik terhadap nilai-nilai toleransi dan moderasi yang diajarkan di sekolah. Temuan ini sejalan dengan riset Pratama (2023) yang menegaskan bahwa paparan konten keagamaan eksklusif di media sosial berkontribusi terhadap polarisasi sikap keberagamaan remaja.

Lebih jauh, paradoks ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari pembenahan etika publik dan budaya keteladanan. Pendidikan karakter yang efektif menuntut sinergi antara sekolah, keluarga, negara, dan tokoh agama dalam menghadirkan praktik keberagamaan yang konsisten, inklusif, dan berkeadaban (Suyadi & Sutrisno, 2022; Berkowitz & Bier, 2014). Tanpa keteladanan nyata, moderasi beragama berpotensi dipersepsi peserta didik sebagai wacana elitis yang tidak relevan dengan realitas sosial mereka.

Dengan demikian, hubungan antara pendidikan karakter dan moderasi beragama bersifat saling menentukan. Krisis keteladanan tidak hanya melemahkan pendidikan karakter secara umum, tetapi juga menggerus legitimasi moderasi beragama sebagai nilai hidup bersama. Oleh karena itu, rekonstruksi pendidikan moderasi beragama harus diarahkan tidak hanya pada penguatan kurikulum, tetapi juga pada pembentukan ekosistem keteladanan yang autentik dan berkelanjutan (Huda, 2021; Pratama, 2023).

### **Tantangan Moderasi Beragama di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat, termasuk peserta didik, memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Era digital menghadirkan ruang baru bagi ekspresi dan transmisi wacana keagamaan melalui media sosial, platform berbagi video, dan aplikasi pesan instan. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang besar bagi penguatan moderasi beragama melalui akses pengetahuan yang luas dan beragam. Namun,

di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius karena menjadi medium subur bagi penyebaran narasi keagamaan yang intoleran, eksklusif, dan ekstrem (Nisa et al., 2021; Lim, 2017).

Salah satu tantangan utama moderasi beragama di era digital adalah derasnya arus informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Peserta didik sering kali menerima konten keagamaan dari sumber yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang jelas. Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang bersifat provokatif dan emosional, sehingga narasi keagamaan yang ekstrem lebih mudah tersebar dibandingkan pesan keagamaan yang moderat dan reflektif. Kondisi ini menyebabkan peserta didik rentan mengadopsi pandangan keagamaan yang sempit tanpa melalui proses pemahaman yang kritis (Rohman & Lessy, 2020; Sunstein, 2018).

Tantangan berikutnya adalah munculnya otoritas keagamaan baru di ruang digital. Tokoh agama digital, influencer, dan kanal dakwah daring sering kali memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang keagamaan generasi muda. Tidak semua otoritas digital tersebut mengusung nilai moderasi beragama. Sebagian justru menampilkan tafsir keagamaan yang hitam-putih dan menolak keberagaman pandangan. Dalam konteks ini, posisi guru dan lembaga pendidikan sering kali kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan konten keagamaan di media sosial (Azra, 2021; Campbell, 2013).

Selain itu, ruang digital mendorong terjadinya fragmentasi identitas keagamaan. Peserta didik cenderung membentuk komunitas daring yang homogen berdasarkan kesamaan pandangan keagamaan, sehingga interaksi dengan perspektif yang berbeda semakin terbatas. Fenomena *echo chamber* ini memperkuat sikap eksklusif dan mengurangi kemampuan dialog lintas pandangan. Akibatnya, nilai moderasi beragama yang diajarkan di sekolah sering kali tidak menemukan ruang aktualisasi dalam kehidupan digital peserta didik (Sutrisno, 2022; Pariser, 2011).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan literasi digital keagamaan dalam kurikulum Pendidikan Islam. Pembelajaran PAI umumnya belum secara sistematis membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis dalam menyaring konten keagamaan digital. Kurikulum masih berfokus pada penguasaan materi keagamaan konvensional, sementara dinamika keberagaman di ruang digital belum menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pengalaman belajar di sekolah dan realitas digital yang dihadapi peserta didik

sehari-hari (Zuhdi, 2023; Hobbs, 2017).

Dari sisi pedagogis, tantangan moderasi beragama di era digital juga berkaitan dengan kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki literasi digital yang memadai untuk merespons isu-isu keagamaan yang berkembang di media sosial. Keterbatasan ini membuat guru sulit mengintegrasikan diskusi kritis tentang konten digital keagamaan ke dalam pembelajaran PAI. Akibatnya, ruang kelas kehilangan relevansinya sebagai ruang dialog yang mampu menjawab kegelisahan dan pertanyaan keagamaan peserta didik di era digital (Rohman & Lessy, 2020).

Dalam konteks kebijakan, penguatan moderasi beragama di era digital masih menghadapi tantangan koordinasi antar sektor. Upaya pemerintah dalam mempromosikan moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan literasi digital dan pengawasan konten keagamaan daring. Tanpa sinergi yang kuat antara sektor pendidikan, teknologi, dan keagamaan, upaya penguatan moderasi beragama berpotensi terfragmentasi dan kurang efektif (Kementerian Agama RI, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa era digital menghadirkan tantangan multidimensional bagi penguatan moderasi beragama, khususnya di kalangan peserta didik. Tantangan tersebut mencakup aspek informasi, otoritas keagamaan, identitas digital, literasi kritis, dan kesiapan pedagogis. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama di era digital memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pendidikan agama, literasi digital, dan penguatan ekosistem sekolah. Tanpa upaya tersebut, pendidikan moderasi beragama berisiko tertinggal dari dinamika keberagamaan di ruang digital.

### **Rekonstruksi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Islam**

Rekonstruksi moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Islam merupakan upaya konseptual dan pedagogis untuk menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pembelajaran di sekolah dan madrasah. Meskipun moderasi beragama telah diakui secara normatif dalam kebijakan nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pendekatan yang terlalu kognitif, bersifat administratif, dan kurang kontekstual. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum diperlukan agar moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi terinternalisasi sebagai kompetensi sosial-keagamaan peserta didik (Kementerian Agama RI, 2020).

Secara konseptual, rekonstruksi moderasi beragama menuntut

pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan berbasis kompetensi dan pengalaman belajar. Moderasi beragama perlu diposisikan sebagai kemampuan yang dapat dipelajari, dilatih, dan dievaluasi, bukan sekadar sikap moral yang diasumsikan tumbuh secara otomatis. Paradigma ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang belajar memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun relasi sosial yang inklusif dalam kehidupan nyata (Azra, 2021).

Dari sisi struktur kurikulum, rekonstruksi dapat dilakukan dengan memperjelas posisi moderasi beragama sebagai kompetensi lintas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Moderasi beragama tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi perlu dirumuskan secara operasional dalam capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta indikator asesmen. Dengan demikian, nilai moderasi beragama tidak terfragmentasi, melainkan terintegrasi secara konsisten dalam pembelajaran akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam (Sutrisno, 2022).

Rekonstruksi kurikulum juga menuntut penguatan pendekatan pedagogis yang dialogis dan kontekstual. Pembelajaran moderasi beragama perlu diarahkan pada metode diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan refleksi pengalaman sosial peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep toleransi dan keadilan, tetapi juga mempraktikkannya dalam situasi konkret. Tanpa perubahan pendekatan pedagogis, moderasi beragama berisiko diajarkan melalui metode yang tidak selaras dengan nilai yang ingin ditanamkan (Zuhdi, 2023).

Selain itu, rekonstruksi moderasi beragama harus memperhatikan konteks digital yang membentuk cara peserta didik belajar dan berinteraksi. Kurikulum Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan literasi digital keagamaan sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama. Peserta didik perlu dibekali kemampuan kritis untuk memilah informasi keagamaan di media sosial, memahami perbedaan otoritas keagamaan, serta merespons narasi ekstrem secara rasional dan etis. Integrasi literasi digital ini menjadi semakin penting mengingat kuatnya pengaruh ruang digital terhadap pembentukan sikap keagamaan generasi muda (Nisa et al., 2021).

Rekonstruksi moderasi beragama juga berkaitan dengan sistem evaluasi pembelajaran. Penilaian tidak dapat hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi harus mencakup penilaian sikap dan perilaku moderat peserta didik.

Pengembangan instrumen asesmen autentik, seperti observasi sikap, portofolio reflektif, dan proyek sosial, menjadi langkah penting untuk mengukur keberhasilan moderasi beragama secara lebih komprehensif. Tanpa sistem evaluasi yang tepat, efektivitas rekonstruksi kurikulum sulit diukur secara objektif (Sutrisno, 2022).

Lebih jauh, rekonstruksi moderasi beragama menuntut sinergi antara kurikulum, guru, dan ekosistem sekolah. Kurikulum yang moderat harus didukung oleh guru yang memiliki kompetensi pedagogis dan sikap keagamaan yang inklusif, serta oleh budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga dihidupkan dalam praktik keseharian sekolah melalui kebijakan, interaksi sosial, dan kegiatan kemasyarakatan (Rohman & Lessy, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan agama dalam konteks masyarakat plural. Rekonstruksi ini tidak cukup dilakukan melalui penambahan terminologi moderasi beragama dalam dokumen kurikulum, tetapi harus menyentuh aspek paradigma, pedagogi, evaluasi, dan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan rekonstruksi yang komprehensif, Pendidikan Islam diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

## **KESIMPULAN**

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi moderasi beragama masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pendekatan pembelajaran yang berorientasi kognitif, implementasi kebijakan yang bersifat top-down, keterbatasan kompetensi pedagogis guru, serta belum optimalnya sistem evaluasi sikap dan perilaku moderat peserta didik. Kondisi ini menyebabkan moderasi beragama sering dipahami sebagai wacana normatif, tetapi belum terinternalisasi secara mendalam dalam kehidupan sosial peserta didik.

Selain itu, peran guru dan ekosistem sekolah terbukti sangat menentukan keberhasilan penguatan moderasi beragama. Guru yang memiliki pemahaman keagamaan inklusif dan menerapkan pembelajaran dialogis mampu memperkuat internalisasi nilai moderasi beragama. Sebaliknya, tanpa dukungan budaya sekolah yang inklusif dan kebijakan institusional yang konsisten, upaya penguatan moderasi beragama di ruang kelas cenderung tidak berkelanjutan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa era digital menghadirkan tantangan baru bagi moderasi beragama. Derasnya arus informasi keagamaan di media sosial, munculnya otoritas keagamaan digital yang tidak selalu moderat, serta rendahnya literasi digital keagamaan peserta didik memperlemah peran sekolah sebagai sumber utama pembelajaran agama. Kurikulum Pendidikan Islam belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika keberagaman di ruang digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Islam. Rekonstruksi perlu dilakukan melalui penguatan pendekatan pedagogis yang dialogis dan kontekstual, integrasi literasi digital keagamaan, pengembangan sistem evaluasi sikap yang komprehensif, serta penguatan sinergi antara guru dan ekosistem sekolah. Dengan rekonstruksi yang menyeluruh, moderasi beragama diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi menjadi praksis pendidikan yang berkontribusi nyata dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan inklusif dalam sistem pendidikan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). Pendidikan Islam dan penguatan moderasi beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 115–130.
- Azra, A. (2021). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran ke praktik sosial*. Kencana.
- Baidhawry, Z. (2020). The problem of religious authority and moderation in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 329–356.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2014). Research-based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 72–85.
- Campbell, H. A. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Fauzi, M., & Ma'arif, S. (2021). Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di sekolah menengah. *Edukasia Islamika*, 6(1), 45–60.
- Hasanah, U. (2023). Kompetensi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai moderasi beragama. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 77–92.
- Hidayat, N. (2022). Literasi digital keagamaan dan penguatan karakter moderat generasi muda. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 201–218.
- Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy*. Wiley-Blackwell.
- Huda, M. (2021). Disonansi nilai moderasi beragama dalam praktik sosial keagamaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–160.

- Ilham, M., & Setiawan, R. (2023). Media sosial dan pembentukan wacana keagamaan remaja. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 33–48.
- Junaidi, A. (2021). Roadmap moderasi beragama dan implikasinya terhadap pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 5(2), 101–118.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Roadmap moderasi beragama 2020–2024*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam*. Kementerian Agama RI.
- Lestari, D. (2021). Budaya sekolah dan penguatan nilai toleransi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 150–162.
- Lickona, T. (2018). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Mulyadi, A. (2022). Pelatihan guru dan tantangan implementasi moderasi beragama. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1), 89–104.
- Muslich, M. (2018). *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Nisa, E. F., et al. (2021). Religious moderation in Indonesian cyberspace. *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 289–312.
- Nugraha, F., & Widodo, H. (2022). Kultur sekolah inklusif dan efektivitas pendidikan toleransi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 7(3), 210–225.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Prasetyo, E. (2023). Integrasi kompetensi abad 21 dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 55–70.
- Pratama, R. (2023). Polarisasi keberagaman remaja di era media sosial. *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 11(1), 55–70.
- Rahmawati, L., & Yusuf, M. (2022). Integrasi moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 134–149.
- Rohman, F., & Lessy, Z. (2020). Literasi digital dan tantangan pendidikan agama Islam di era media sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 23–38.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Suryana, Y. (2022). Pendekatan dialogis dalam pembelajaran PAI berbasis

- moderasi. *Jurnal Tarbiyah*, 29(1), 65–80.
- Sutrisno. (2022). Fragmentasi identitas keagamaan generasi muda di ruang digital. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 45–60.
- Suyadi, & Sutrisno. (2022). Pendidikan karakter berbasis moderasi beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 1–14.
- Zarkasyi, H. F., & Kurniawan, A. (2022). Media digital dan krisis keteladanan publik. *Jurnal Dakwah dan Media*, 6(2), 201–215.
- Zuhdi, M. (2023). Integrasi literasi digital dalam kurikulum PAI berbasis moderasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 101–118.